

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) merumuskan tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) untuk pertama kalinya pada tahun 1987, yakni: “Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan bagi generasi yang akan datang” (*Commission on Environment and Development* (GRI, 2006)). Pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi peran pemerintah, tetapi juga melibatkan peran seluruh warga negara dan organisasi-organisasi termasuk perusahaan.

Setelah munculnya rumusan PBB mengenai *sustainable development*, maka paradigma dalam dunia usaha juga ikut berubah, yang selama ini berasal dari *profit oriented only*, kemudian menjadi berorientasi pada tiga hal yang sering disebut dengan *Tripple-P Bottom Line*. Beralihnya orientasi kepada ketiga hal tersebut merupakan usaha yang digunakan oleh manajer perusahaan untuk mencapai *sustainability development*, melalui aktivitas-aktivitas operasi yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan keuntungan (*profit*), bumi (*planet*), dan komunitas (*people*) (Elkington dalam Nugroho, 2009). Berkembang pesatnya isu *sustainability development* seiring dengan meningkatnya isu-isu kerusakan alam seperti polusi udara, tanah,

pembuangan limbah cair, penggundulan hutan, sistem pembangunan yang tidak ramah lingkungan, sampai pada perubahan iklim. Fenomena-fenomena ini yang kemudian mengingatkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang ada, dikarenakan jumlahnya yang terbatas sehingga menjadikan tuntutan bagi perusahaan agar mampu menggunakannya dengan seefisien mungkin dalam memenuhi kebutuhan operasi.

Perusahaan dalam usahanya untuk mencapai *sustainability development* diperlukan sebuah kerangka global dengan bahasa yang konsisten dan dapat diukur dengan tujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) (Suryono dan Prastiwi, 2011). Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan bentuk laporan yang bersifat sukarela (*voluntary*) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. *The Global Reporting Initiative* (GRI) yang bermarkas di Belanda, mengembangkan *framework sustainability report* yang menjadi pedoman perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan *sustainability reporting*. Pedoman terakhir yang dihasilkan oleh GRI adalah *G4 Guidelines* yang berisi tentang standar pengungkapan laporan keberlanjutan dengan aspek terbaru. GRI *G4 Guidelines* yang diperbaharui pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa terdapat aspek yang harus dipenuhi, yaitu: profil organisasi, indikator kinerja dan pendekatan manajemen termasuk yang terkait dengan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*).

Pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) semakin mendapat perhatian dalam praktek bisnis global dan menjadi salah satu

kriteria dalam menilai tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Para pemimpin perusahaan dunia semakin menyadari bahwa pengungkapan laporan yang lebih komprehensif (tidak hanya sekedar laporan keuangan) akan mendukung strategi perusahaan. Selain itu dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap *sustainable development* (CSR Quest dalam Dilling, 2010).

Sustainability report diperlukan agar *stakeholders* termasuk masyarakat, mengetahui segala bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Hal ini mengingat banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan lingkungan, seperti tragedi banjir lumpur panas di Sidoarjo karena PT. Lapindo Brantas Inc dan pencemaran teluk Buyat di Minahasa Selatan karena PT. Newmont Minahasa Raya (Khaula, 2012). Perusahaan yang terkait harus bertanggung jawab atas kerugian yang diperoleh masyarakat karena dampak dari kejadian tersebut. Perusahaan dapat melaporkan tanggung jawab yang telah dilakukan dalam sebuah laporan keberlanjutan atau *sustainability report*.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1, dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 (b) menyatakan bahwa, “Setiap penanam modal

berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Dalam peraturan-peraturan tersebut menerangkan apabila perseroan tidak melaksanakan kewajiban, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sudah diwajibkan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang tersebut menjadi salah satu dorongan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemudian mengungkapkannya dalam *sustainability report*.

Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa dalam teori *stakeholder*, perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh adanya *stakeholders*.

Dalam pengambilan keputusan, para *stakeholder* membutuhkan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan aktivitas yang telah dilakukan. Perusahaan akan berusaha untuk mengungkapkan informasi yang berintegritas, agar para *stakeholder* tetap menaruh kepercayaan terhadap perusahaan.

Salah satu faktor yang membuat sebuah perusahaan melakukan pengungkapan *sustainability report* adalah dengan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan identik dengan upaya-upaya untuk melakukan pengungkapan

yang lebih luas. Luasnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan adalah upaya untuk memperoleh dukungan dan mencari simpati para *stakeholder*-nya. Perusahaan dengan kinerja yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan dalam proses pembentukan *image* yang sangat berpengaruh untuk mendapat kepercayaan dari para *stakeholder*. Kinerja perusahaan yang baik, dapat dicerminkan melalui tingkat profitabilitas dan *lverage* yang akan diperoleh dari waktu ke waktu (Suryono dan Prastiwi 2011).

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kemampuan sebuah perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report* adalah mekanisme *corporate governance* yang baik di dalam perusahaan. Ratnasari (2011) mengungkapkan bahwa kualitas perusahaan bisa dilihat dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Corporate governance* dapat dilihat melalui kinerja komite audit, dewan direksi dan *governance committee*. *Corporate governance* yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan kebijakan perusahaan. Keterlibatan mereka sangat penting dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan, hal ini disebabkan karena kinerja dari *corporate governance* dibutuhkan sebagai pengawasan, pengendalian, serta penelaahan terhadap aktivitas yang akan dilakukan perusahaan dalam pengembangan usahanya. Penerapan *good corporate governance* membantu dalam pengungkapan informasi sosial dan lingkungan khususnya dalam *sustainability report* untuk menilai keselarasan keputusan perusahaan terhadap nilai-nilai sosial dan lingkungan sekitar. Terbentuknya komite audit, dewan direksi dan *governance committee*, akan membantu menciptakan pengungkapan informasi yang luas

dan terintegrasi guna menjadi nilai tambah tersendiri untuk para investor atau *stakeholder*.

Pengungkapan informasi yang lebih luas bisa dilihat juga dengan karakteristik perusahaan dari skala ukuran. Perusahaan besar biasanya cenderung mengungkapkan secara luas informasi terkait perusahaan dikarenakan mereka memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar kepada masyarakat (Nasir dan Ilham 2014). Perusahaan besar pada umumnya juga memiliki kekayaan sumber daya yang lebih banyak serta kegiatan yang lebih banyak. Sehingga sebuah perusahaan besar haruslah mewajibkan pengungkapan *sustainability report* dan bukan hanya dilakukan secara sukarela.

Pengungkapan informasi praktik sosial lingkungan dan standar pelaporan *sustainability report* yang berkualitas terus diteliti dalam berbagai studi empiris. Dilling (2010) meneliti tentang perbedaan antara perusahaan yang telah menerbitkan *sustainability report* dengan yang tidak, bila dilihat dari karakteristik perusahaan yang diukur dengan jenis sektor operasi, kinerja keuangan, pertumbuhan jangka panjang, *corporate governance*, maupun lokasi perusahaan–perusahaan tersebut didirikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki karakteristik profitabilitas yang tinggi, bergerak di sektor pertambangan, dan memiliki pertumbuhan jangka panjang yang kuat berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengungkapan *sustainability report* cenderung masih tergolong dalam fase awal. Penelitian terdahulu yang telah di

lakukan di Indonesia masih memiliki perbedaan dari hasil penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Hal ini yang mendasari perlunya penelitian-penelitian lebih lanjut untuk lebih memahami bagaimana karakteristik, manfaat, maupun hal lain terkait dengan pengungkapan *sustainability report* yang masih belum teroptimalisasi sepenuhnya. Penelitian ini dilakukan karena dalam penelitian terdahulu masih sedikit yang membandingkan variabel-variabel karakteristik perusahaan dengan *sustainability reporting*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat *research gap* yaitu adanya perbedaan hasil penelitian pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan Ratnasari (2011) menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam *sustainability report* yang dilihat dari ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat dan komite audit. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa karakteristik *corporate governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi (2011) perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2011) bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik perusahaan yang diukur dengan profitabilitas, *likuiditas*, *leverage*, aktivitas, ukuran perusahaan dan *corporate governance* yang diukur dengan komite audit, dewan direksi, *governance committee* perusahaan yang mengeluarkan *sustainability report* dan yang tidak mengeluarkan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang ditimbulkan oleh variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan direksi, dan komite audit. Sedangkan variabel likuiditas, *leverage*, aktivitas, dan *governance committee* tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Khaula (2012) untuk mengetahui pengaruh dari kinerja keuangan, ukuran perusahaan, struktur modal dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel total aset, jumlah karyawan, rapat dewan direksi, dan keberadaan *governance committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Adapun *leverage* menunjukkan pengaruh secara negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan *return on asset*, *current ratio*, *inventory turnover*, struktur modal, rapat komite audit menunjukkan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nasir, Ilhman dan Utara (2014) menguji tentang karakteristik perusahaan yang diukur dengan profitabilitas, likuiditas, *leverage*, aktivitas, ukuran perusahaan dan *corporate governance* yang diukur dengan komite audit, dewan direksi, *governance committee*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *return on asset*, *debt to equity ratio* dan *governance committee* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan *current ratio*, *inventory*

turnover, *size*, komite audit, dan dewan direksi, tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Adhipradana (2014) yang meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan *coporate governance* Terhadap Pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini diukur dengan profitabilitas, likuiditas, rasio pembayaran dividen, total aset, total karyawan, komite audit, dewan komisaris, *governance committee*, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan asing. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Adanya pengaruh secara signifikan antara perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan apabila dilihat dari variabel-variabel total aset, total karyawan, dan *governance committee*. Sementara profitabilitas, likuiditas, dividend payout ratio, komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajemen maupun kepemilikan asing bagi perusahaan tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2009) yang meneliti pada PT. Antam.Tbk yang bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan perusahaan dalam bentuk *sustainability report*. Hasil dari penelitian ini, menunjukan bahwa PT. Antam telah menggunakan standar dan pedoman dari *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam membuat *sustainability report*.

Beberapa argumen tersebut yang kemudian menjadi masukan bagi peneliti untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan variabel-variabel kinerja perusahaan (profitabilitas, likuiditas, *leverage* dan aktivitas perusahaan), ukuran perusahaan dan juga praktik *corporate governance* (komite audit, dewan direksi, serta *governance committee*) antara perusahaan yang membuat dan tidak membuat *sustainability report*. Kemudian dengan ditemukannya perbedaan, akan mengindikasikan adanya pengaruh dalam pembuatan *sustainability report*, sehingga selanjutnya akan dianalisis bagaimana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap inisiatif manajer perusahaan perusahaan untuk melakukan pengungkapan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi praktik pengungkapan *sustainability report*, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran perusahaan- perusahaan untuk bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan, karena masih banyak perusahaan yang merusak lingkungan sekitar tanpa bertanggungjawab,

2. Banyak perusahaan cenderung mementingkan keuntungan untuk perusahaan itu sendiri dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada tanpa memperbaharui sumber daya yang digunakan,
3. Ukuran perusahaan yang lebih besar kurang memiliki kesadaran bahwa semakin besar perusahaan tersebut, maka semakin besar juga tanggung jawabnya terhadap lingkungan sosialnya,
4. Tata kelola perusahaan yang buruk dalam menilai keselarasan keputusan perusahaan terhadap nilai-nilai social dilingkungan sekitar,
5. Adanya perbedaan pendapat penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian kali ini dibatasi pada pengaruh yang ditimbulkan dari kinerja keuangan yang diukur dengan profitabilitas dan *leverage*, ukuran perusahaan dan *corporate governance* yang diukur dengan komite audit, dewan direksi dan *governance committee* terhadap pengungkapan *sustainability report*.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* ?
2. Apakah tingkat *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
5. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* ?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi untuk mengetahui apa saja variabel-variabel karakteristik perusahaan dan praktik *corporate governance* yang mampu memberikan pengaruh dalam pengungkapan *sustainability report* di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya dan manfaat yang mampu ditimbulkan melalui pengungkapan *sustainability report* bagi perusahaan, yang diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis bagi peneliti adalah sebagai bukti empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan kegunaannya bagi perusahaan adalah sebagai informasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan mengenai kebijakan *sustainability report* dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders* perusahaan. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi agar dalam berinvestasi para *stakeholders* memilih perusahaan yang transparan dalam mengungkapkan informasi dan memiliki kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan